

Catatan Atas Laporan Keuangan

AUDITED

**DITJEN BIMBINGAN
MASYARAKAT HINDU (07)**

Periode yang Berakhir 31 Desember 2024



**Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Barat**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antarlain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan AUDITED Tahun 2024 Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan AUDITED Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan AUDITED Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Di samping itu, laporan keuangan AUDITED Tahun 2024 ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Mamuju, 09 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. H. Adnan Nota

NIP. 196912311991031024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	33
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	51
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	52
F. Pengungkapan Penting Lainnya	56



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT

Jalan. HAM. PattanaEndeng No.46 Mamuju 91511
Telepon (0426) 2325293, Fax (0426) 2325294
Website: <http://sulbar.kemenag.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan AUDITED Tahun 2024 Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan AUDITED Tahun 2024 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mamuju, 09 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



DR. H. Adnan Nota
NIP. 196912311991031024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT

Jalan. HAM. PattanaEndeng No.46 Mamuju 91511
Telepon (0426) 2325293, Fax (0426) 2325294
Website: <http://sulbar.kemenag.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan AUDITED Tahun 2024 Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan AUDITED Tahun 2024 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mamuju, 09 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



DR. H. Adnan Nota
NIP. 196912311991031024

Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp. 0** atau mencapai **0,00** persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp.0**.

Realisasi Belanja Negara pada Audited Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 2,699,058,372** atau mencapai **99** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 2,710,268,000**.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023

. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar **Rp. 69,095,884** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp. 150,000** Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar **Rp.0**, Aset Tetap (neto) sebesar **Rp. 68,945,884** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp. 0**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp. 0** dan **Rp. 69,095,884**.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsure pendapatan-LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp. 0**,

sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp. (2,665,343,738,)** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp. (2,665,343,738)** Surplus Kegiatan Non Operasional dan surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp. 0** dan sebesar **Rp.0** sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar **Rp. (2,665,343,738)**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 35,381,250** dikurangi defisit-LO sebesar **Rp. (2,665,343,738)** dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai **Rp.0** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp. 2,699,058,372.** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp. 69,095,884.**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU KANWIL KEMENAG PROVINSI SULAWESI BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Tahun 2024		% thd Angg	Tahun 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0.00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0.00	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	434,000,000	429,750,000	99.02	586,747,000
Belanja Barang	B.4	2,224,268,000	2,217,309,091	99.69	1,923,194,740
Belanja Modal	B.5	52,000,000	51,999,281	100.00	30,000,000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		2,710,268,000	2,699,058,372	99.59	2,539,941,740

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU KANWIL KEMENAG PROVINSI
SULAWESI BARAT
NERACA
PER 31 Desember 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		
Kas Lainnya dan Setara Kas			
Persediaan	C.2	150,000	240,000
Jumlah Aset Lancar		150,000	240,000
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.3	327,391,100	275,391,819
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.4	(258,445,216)	(240,250,569)
Jumlah Aset Tetap		68,945,884	35,141,250
JUMLAH ASET		69,095,884	35,381,250
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5		
Utang Yang Belum Ditagihka	C.6		
Uang Muka dari KPPN	C.7		
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.8	69,095,884	35,381,250
JUMLAH EKUITAS		69,095,884	35,381,250
JUMLAH EKUITAS		69,095,884	35,381,250
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		69,095,884	35,381,250

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU KANWIL KEMENAG PROVINSI
SULAWESI BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	429,750,000	586,747,000
Beban Persediaan	D.3	18,284,000	15,012,000
Beban Barang dan Jasa	D.4	875,738,090	781,753,000
Beban Pemeliharaan	D.5	17,224,230	21,150,000
Beban Perjalanan	D.6	701,152,771	595,419,740
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	605,000,000	510,000,000
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	18,194,647	19,968,000
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		2,665,343,738	2,530,049,740
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2,665,343,738)	(2,530,049,740)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2,665,343,738)	(2,530,049,740)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(2,665,343,738)	(2,530,049,740)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU KANWIL KEMENAG PROVINSI
SULAWESI BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
EKUITAS AWAL	E.1	35,381,250	25,489,250
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2,665,343,738)	(2,530,049,740)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2,699,058,372	2,539,941,740
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		33,714,634	9,892,000
EKUITAS AKHIR	E.5	69,095,884	35,381,250

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

Dasar Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat
Hukum Dibentuk Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor
Entitas 32 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi
dan Barat, Untuk Meningkatkan Pelayanan Serta Pembinaan
Rencana Kehidupan Beragama Dipandang Perlu Membentuk Kantor
Strategis Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Yang
 Didasarkan Pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13
 Tahun 2005. Sebagai Instansi Vertikal Di Daerah, Kantor
 Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat
 Berkedudukan Di Mamuju Mempunyai Tugas
 Melaksanakan Bimbingan Dan Pelayanan Di Bidang
 Kehidupan Beragama Di Provinsi Sulawesi Barat
 Berdasarkan Kebijakan Menteri Agama Dan Peraturan
 Perundang-Undangan Yang Berlaku. Bimbingan Masyarakat
 Hindu Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat
 Berlokasi Di Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama
 Provinsi Sulawesi Barat Lantai I di Jln. H.A.M. Pattana
 Endeng No. 46 Mamuju.

Untuk Mewujudkan Tujuan Diatas Kantor
 WilayahKementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat
 Berdasarkan Surat Keputusan Kanwil Kementerian Agama
 Provinsi Sulawesi Barat Berkomitmen Dengan Visi “
***Terwujudnya masyarakat Sulawesi Barat yang taat
 beragama, rukun,cerdas dan sejahtera lahir dan batin
 dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat,
 mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong
 royong.***”

Untuk Mewujudkan Visi Tersebut Kantor Wilayah
 Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Melakukan

Beberapa Langkah-Langkah Strategis Atau Misi Sebagai Berikut:

- ✚ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Kehidupan Beragama.
- ✚ Meningkatkan Kualitas Pemahaman Dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama.
- ✚ Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Dan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan.
- ✚ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ibadah Haji Dan Umrah.
- ✚ Meningkatkan Tata Kelola Adminitrasi Secara Profesionalisme.

Sementara Tujuan Jangka Panjang Pembangunan Di Bidang Keagamaan Hendak Ingin Dicapai Oleh Kanwil Terwujudnya Masyarakat Sulawesi Barat Yang Religius, Rukun, Santun, Cerdas Dan *Mala'bi* Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan Mempertimbangkan Kondisi, Potensi, Dan Permasalahan Yang Ada Dan Sinerjik Dengan Visi, Misi Dan Tujuan Jangka Panjang Yang Telah Ditentukan Maka Kanwil Kementerian Agama Menetapkan Sasaran Strategi Yang Hendak Di Capai Dalam Periode 2020-2025 Dengan Skala Bidang Prioritas Yaitu:

- ✚ Pelayanan Dan Kehidupan Beragama.
- ✚ Pemahaman Dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama.
- ✚ Pelayanan Pendidikan Agama Dan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan.
- ✚ Tata Kelola Administrasi Secara Profesionalisme.

1. Pelayanan Kehidupan Beragama

Sasaran strategis bidang pelayanan dan kehidupan beragama merupakan rencana tindakan dan alokasi sumber daya dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat bidang pelayanan dan kehidupan

beragama adalah terwujudnya suatu Kondisi Keberagaman masyarakat yang agamais, dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan, kegiatan ini dilakukan melalui :

- ✓ Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama dengan.
- ✓ Meningkatkan kualitas pengenalan ajaran agama, dikalangan pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari.
- ✓ Meningkatkan motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional.
- ✓ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam dalam membayar *zakat, wakaf, infak, dan shadaq*.
- ✓ Meningkatkan kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan santun.
- ✓ Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas peribadatan.
- ✓ Meningkatkan peran umat beragama dalam membangun harmonis antar peradabad.
- ✓ Meningkatkan pemberdayaan potensi ekonomi keagamaan.
- ✓ Meningkatkan *sinerjik* kebijakan dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- ✓ Meningkatkan akses umat beragama terhadap sumber daya ekonomi keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat beragama.
- ✓ Meningkatkan bantuan untuk rehabilitas rumah ibadah.
- ✓ Meningkatkan peran dan kualitas Penyuluh Agama.

2. Bidang Pemahaman Dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama

Sasaran strategis bidang pemahaman dan pengembangan nilai-nilai agama adalah terwujudnya

kehidupan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, dan penyelenggara Negara yaitu ditandai dengan:

- ✓ Meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam memahami nilai-nilai ajaran agamanya.
- ✓ Meningkatkan kualitas tenaga pengelola *zakat, infaq* dan *shadaqah*.
- ✓ Meningkatkan kualitas penyuluh agama.
- ✓ Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama.
- ✓ Berkembangnya pemahaman keagamaan masyarakat yang berwawasan *multikural gender* dan HAM.

3. Bidang Tata Kelola administrasi Secara Profesional

Sasaran strategis dibidang tata kelola *administratif* secara *Efektif, Efisien* dan *Akutanbel* serta tersediannya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional ditandai dengan:

- ✓ Terwujudnya reformasi dan *birokrasi* secara *Komperatif* baik Tingkat Kanwil maupun Kabupaten.
- ✓ Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti diklat dengan siklus minimal 5 Tahun.
- ✓ Terwujudnya struktrur organisasi *istansi vertikal* Kementerian Agama yang sesuai dengan tuntutan Perkembangan.
- ✓ Meningkatnya Jumlah dan nilai temuan hasil pemeriksaan *BPK, BPKP*, dan inspekorat jenderal.
- ✓ Tercapainya laporan Keuangan Kanwil Kementerian Agama dengan *Opini WTP* (Wajar tanpa pengecualian).
- ✓ Meningkatnya kualitas aparatur *SDM* melalui Sistem *rekrutmen*, penempatan dan pembinaan yang professional.
- ✓ Terbangunnya sistem informasi dan Komunikasi yang Efektif dan efektif.

- ✓ Terbangunnya citra Positif Kanwil kementerian Agama sebagai Instansi pemerintah yang bersih dan berwibawa.
- ✓ Terwujudnya tertib tata kelola *administratif* yang professional.

4. Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu adalah bagian integral dari pemerintah yang ditugaskan untuk menjembatani hubungan antara Negara dan Organisasi-organisasi PHDI yang ada di Indonesia. Tugas ini adalah konsekuensi dari system pemerintahan yang menempatkan Negara dan PHDI sebagai dua organisasi yang terpisah namun keduanya dapat bekerja sama atau dapat menjalin kemitraan yang saling menguntungkan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 03 Tahun 2006 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Bab VI pasal 398, maka **tugas pokok** Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu adalah: **“Menyelenggarakan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang bimbingan Masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri”**.

Inti utama yang terdapat dalam Visi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tahun 2020-2025 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Hindu yang Taat Beragama, Rukun, cerdas dan Sejahtera lahir dan Bathin** dilakukan karena menyadari bahwa banyak hal yang menjadi domain (ranah) Pura dimana pemerintah tidak memiliki wewenang untuk menanganinya. Namun pemerintah dapat membantu melalui saran, bimbingan,

bantuan dana, dan berbagai informasi yang diperlukan. Secara garis besar implementasi Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tahun 2020-2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama Hindu.
2. Meningkatkan Pelayanan kehidupan beragama Hindu.
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Hindu
4. Memberdayakan lembaga social keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan Hindu.
5. Memperkokoh kerukunan umat beragama Hindu.
6. Mengembangkan seni dan budaya serta keselarasan pemahaman keagamaan Hindu.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Bimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menyusun program yang bertujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan Bimbingan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Agama Hindu. Hasil yang hendak dicapai melalui program ini dinyatakan melalui visi ***“Terwujudnya Masyarakat Hindu Indonesia Yang Taat Beragama, Maju Sejahtera dan Harmonis Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut Bimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat melakukan beberapa langka-langka strategis atau Misi sebagai berikut:

- Meningkatkan Bimbingan Masyarakat Hindu Sulawesi Barat.
- Meningkatkan kualitas kerukunan internal dan eksternal.

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh Agama Hindu.
- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga Keagamaan Hindu dalam membimbing umat Hindu agar menjadi umat beragama dan warga Negara yang berkualitas.
- Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Agama Hindu.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga teknis Keagamaan Hindu.
- Meningkatkan kualitas lembaga Agama dan Lembaga Pendidikan Agama Hindu.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Hindu.
- Meningkatkan kualitas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Administrasi Bimas Hindu.

FUNGSI

Bertolak dari Visi dan Misi Bimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, maka kebijakan penyelenggaraan Bimas Hindu dalam kaitannya dengan ***fungsi*** sebagai pelayan masyarakat adalah:

A. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama

Bidang urusan Agama Hindu memiliki tugas utama dalam pembinaan organisasi Lembaga Keagamaan, pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembinaan pemberdayaan umat yaitu:

- Menertibkan administrasi Lembaga Keagamaan pernah terdaftar di Direktorat Bimas Hindu. Menurut data sampai sekarang ada 116 (Seratus Enam Belas) Lembaga.
- Memberi bantuan kepada Lembaga Keagamaan

Hindudalam bentuk dana untuk operasiomal lembaga.

- Mengadakan pembinaan terhadap Penyuluh Agama Hindu dalam bentuk orientasi.
- Mengadakan pembinaan terhadap Tokoh-Tokoh Agama Hindu dalam bentuk orientasi.

B. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu

Keluaran (*OutPout*) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

- Pemberian bantuan dana, Lembaga Pendidikan yaitu Pasraman Jnana Kerti Mamuju Utara, Pasraman Mojosari Mamuju Utara, Pasraman Widyana Kesuma Mamuju Tengah, dan Pasraman Gita Darma di Mamuju Tengah.
- Mengadakan Pembinaan kepada guru-guru Agama Hindu dan guru pasraman.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Audited Tahun 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung

jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Unit Eselon 07 Bimbingan Masyarakat Hindu adalah 4 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				JumlahSatker
			KP	KD	DK	TP	
1	3400	Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulbar	-	1	-	-	1
2	3400	Kantor Kementerian Agama Kab. Mamasa	-	1	-	-	1
3	3400	Kantor Kementerian Agama Kab. Mamuju Tengah	-	1	-	-	1
4	3400	Kantor Kementerian Agama Kab. Mamuju	-	1	-	-	1
Jumlah			-	4	-	-	4

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Anauudid Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Pendapatan

n-LRA

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan

n-LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset
Lancar*

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BankIndonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang

samadengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh limajuta rupiah;

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
n Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatatnya yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) **Kewajiban**

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal, pagu awal sebesar Rp. 2,923,058,000 setelah revisi terakhir menjadi Rp. 2,710,268,000.

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	558,000,000	434,000,000
Belanja Barang	2,283,058,000	2,224,268,000
Belanja Modal	82,000,000	52,000,000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	2,923,058,000	2,710,268,000

Realisasi
si
Pendap
atan
Rp. 0

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp. 0** atau mencapai **0,00** persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp.0**
Rincian pendapatan dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Pendapatan Pendidikan	0	0	0.00
Pendapatan Lain-lain	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Selama periode tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat pendapatan

pada Bimbingan Masyarakat Hindu.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan TA 2023
(dalam Rupiah)*

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0.00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00%

*Realisas
i Belanja
Negara.
Rp.
2,699,0
58,372*

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 2,699,058,372 atau 99.59% dari anggaran belanja sebesar Rp. 2,710,268,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	434,000,000	429,750,000	99.02
Belanja Barang	2,224,268,000	2,217,309,091	99.69
Belanja Modal	52,000,000	51,999,281	100.00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00
Total Belanja Kotor	2,710,268,000	2,699,058,372	99.59
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah	2,710,268,000	2,699,058,372	99.59

Realisasi Belanja untuk tahun 2024 mengalami **penurunan sebesar (6,26)** persen dibandingkan dengan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan antara lain karena berkurangnya pagu anggaran belanja pegawai akibat pengalihan pembayaran belanja pegawai lingkup Bimas Hindu ke Sekretariat.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Belanja Pegawai	429,750,000	586,747,000	(26.76)
Belanja Barang	2,217,309,091	1,923,194,740	15.29
Belanja Modal	51,999,281	30,000,000	73.33
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0.00
Jumlah	2,699,058,372	2,539,941,740	6.26

Belanja

B.2 Belanja Pegawai

Pegawai

Rp.

429,750

,000

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 429,750,000** dan **Rp. 586,747,000**.. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar **(-19,98)** persen dari realisasi belanja pegawai tahun 2023. Menurunnya belanja pegawai di tahun 2024 akibat pembayaran belanja pegawai serta tunjangan kinerja pegawai pada Bimbingan Masyarakat Hindu sudah tidak dialokasikan lagi pada DIPA Bimas Hindu tetapi pada DIPA Sekretariat Jenderal. Adapun belanja pegawai yang masih dialokasikan pada DIPA Bimas Hindu adalah belanja gaji dan tunjangan pegawai non PNS seperti gaji pengawas sekolah serta penyuluh agama.

Perbandingan

Belanja Pegawai
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	0.00%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pendidik Non PNS	181,750,000	134,747,000	-19.98%
Belanja Gaji dan Tunjangan Penyuluh Non PNS	248,000	452,000,000	
Belanja Lembur	-	-	0.00%
Belanja Tunjangan Khusus	-	-	0.00%
Jumlah Belanja Kotor	429,750,000	586,747,000	-19.98%
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0%

Belanja **B.4 Belanja Barang**

Barang

Rp.

2,217,30

9,091

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2,217,309,091** dan **Rp. 1,923,194,740**. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami **Penurunan sebesar (15,29) %** dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Menurunnya realisasi anggaran tahun 2023 sampai dengan AUDITED IV disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada Bimbingan Masyarakat Hindu.

Perbandingan Belanja Barang
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Barang Operasional	206,942,890	247,568,000	(16.41)
Belanja Barang Non Operasional	523,350,000	370,710,000	41.18
Belanja Barang Persediaan	18,194,000	15,022,000	21.12
Belanja Jasa	142,680,000	163,475,000	(12.72)
Belanja Pemeliharaan	19,989,430	21,000,000	(4.81)
Belanja Perjalanan Dinas	701,152,771	595,419,740	17.76
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	605,000,000	510,000,000	18.63
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat		-	
Jumlah Belanja Kotor	2,217,309,091	1,923,194,740	15.29
Pengembalian Belanja	-	-	0.00
Jumlah Belanja	2,217,309,091	1,923,194,740	15.29

Belanja B.5 Belanja Modal

Modal

Rp.

51,999,2

81

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 51,999,281** dan **Rp. 30,000,000**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami kenaikan sebesar **73,33** persen dibandingkan TA 2023. Realisasi belanja modal tahun 2024 yakni belanja peralatan dan mesin seperti Laptop, Printer pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51,999,281	30,000,000	73.33
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	51,999,281	30,000,000	73.33
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah Belanja	51,999,281	30,000,000	73.33

Belanja

Modal

Tanah

Rp.0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0** dan **Rp. 0**. Tidak ada belanja Modal Tanah pada Bimbingan Masyarakat Hindu.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0.00

Belanja
Modal
Peralat
an dan
Mesin
Rp.
51,999,
281

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar **Rp. 51,999,281** mengalami kenaikan sebesar **73,33** persen bila dibandingkan dengan TA 2023 sebesar **Rp. 30,000,000**. Belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 berupa pembelian Laptop dan Mesin Printer Pada satker Bimas Hindu.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	51,999,281	30,000,000	73.33
Jumlah Belanja Kotor	51,999,281	30,000,000	73.33
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	51,999,281	30,000,000	73.33

Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
Rp.
0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 tidak belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	%
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

*Belanja
Modal
Jalan,
Irigasi
dan
Jaringan
Rp. 0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024. Tidak ada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan
TA 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0.00
Jumlah Belanja	-	-	0.00

*Belanja
Bantuan
Sosial
Rp. 0*

B. 6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**. Tidak ada belanja Bantuan Sosial tahun 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar
Rp.150,000

Jumlah Aset Lancar Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.150,000** dan **Rp.240,000**. Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tertanggal pelaporan.

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0

C.1. 1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara pertanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar **Rp.0** dan **Rp.0** dengan rincian sebagai berikut : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
Bank BRI Mamuju	0	0
Jumlah	0	0

Kas di
bendahara
Penerimaan
Rp.0

C. 1. 2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
Bank BRI BPG MTsN Amawang	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp.0

C. 1. 3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar **Rp. 0** dan **Rp.0**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu Investasi Jangka Pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya di bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang
Bukan Pajak
Rp.0

C. 1. 4 Piutang BukanPajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**

dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Bagian
Lancar
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp.0

C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Nama	Tahun 2024	Tahun 2023
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

Bagian
Lancar
Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**. Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan (TPA) yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TPA untuk

masing-masing Satker disajikan sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih-
Piutang Jk.
Pendek Rp.0*

C.1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0** yang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang, masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak tertagih	-	0%	-

C.1.8 Beban Dibayar Dimuka

*Beban
Dibayar
Dimuka
Rp.0*

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing -masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**. Beban Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar Dimuka Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2024 dan
2023

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	0	0

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp.0*

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan Hak Pemerintah atas layanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing - masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**, dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih
Harus Diterima TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	0
Jumlah	0	0

*Persediaan
Rp.150, 000*

C.1.10 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp. 150,000** dan **Rp.240,000**.

Rincian Persedian TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Barang Konsumsi	150,000	240,000
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	150,000	240,000

Semua Jenis Persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp.68,945,88

4

C. 2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp. 68,945,884** dan **Rp. 35,141,250**. Aset Tetap merupakan asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berupa Peralatan dan Mesin.

C. 2. 1 Tanah

Tanah

Rp. 0

Tanah yang dimiliki oleh Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp. 0**

Mutasib Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Mutasi Kurang :	
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

C. 2. 2 Peralatan dan Mesin

Peralatan
dan Mesin
Rp.327,391,1
00

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp. 327,391,100** dan **Rp. 275,391,819**. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	275,391,819
Mutasi tambah :	
Pembelian	51,999,281
Mutasi tambah :	
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2024	327,391,100
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	258,445,216
Nilai Buku per 31 September 2024	68,945,884

Mutasi Tambah :

Pembelian peralatan dan mesin berupa Laptop dan Printer cetak.

C. 2. 3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp. 0

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp. 0** dan **Rp. 0**. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah :	
Pembangunan Gedung	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 202	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

C. 2. 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**.

Rincian Mutasi Jalan, irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi tambah :	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi Kurang	-
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C. 2. 5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0** dengan rincian sebagai berikut :

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp.0*

*Aset Tetap
Lainnya
Rp.0*

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah :	
-	-
Mutasi Kurang	-
-	
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C. 2. 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp.0*

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**.

C. 2. 7 Akumulasi Penyusutan Aset

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Rp.(
258,445,216)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing – masing adalah sebesar **Rp.(258,445,216)** dan **Rp.(240,250,569)**.

Akumulasi Penyusutan Aset merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain bentuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset per 31 Desember 2024 :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	327,391,100	-258,445,216	68,945,884
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		327,391,100	(258,445,216)	68,945,884

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Piutang
Jangka
Panjang
Rp.0

C.3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang
TagihanTuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp.0

C.3. 1 Piutang TagihanTuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

PiutangTagihanTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang

diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

C.3. 2 Tagihan Penjualan Angsuran

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**. Rincian TPA untuk masing - masing debitur adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang TPA TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

*Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang Rp.0*

C.3. 3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Panjang TA 2024

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Tagihan TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	0%	-

Aset Lainnya

Rp. 0

C.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp. 0** dan **Rp. 0**.

Aset Tak

Berwujud

Rp.0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**.

Aset Tak Berwujud merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak memiliki wujud fisik.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Amortisasi s.d 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	-	-
2	-	-
	Jumlah	-

*Aset Lain -
lain
Rp. 0*

C.4.2. Aset Lain -lain

Aset Lain - lain per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp. 0** dan **Rp. 0**. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi kurang :	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Amortisasi s.d 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Lain – lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.0*

C.4.3.Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**.

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi asset lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
B	Aset Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
	Total	-	-	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C. 5 Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka
Pendek Rp.0*

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atas jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing

adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp.0*

C. 5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Mukadari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**, merupakan Uang Persediaan (UP) atauTambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang
kepada
Pihak Ketiga
Rp.0*

C. 5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**, Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Bimbingan Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	-
2	Potongan Pajak yang belum disetor	-
3	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-
	Total	-

Pendapatan Jasa Giro merupakanbunga bank pada rekening penampungan lainnya yang belum terdaftar pada **Treasury National Pooling (TNP)** dan belum disetorkan ke kas Negara per tanggal

pelaporan.

Potongan Pajak merupakan pungutan pajak bendahara pengeluaran atas transaksi Uang Persediaan yang belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan pembayaran tunjangan kekurangan gaji pegawai Bimas Islam yang belum terbayarkan.

*Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp.0*

C. 5.3. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**, merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

*Pendapatan
Diterima di
Muka Rp.0*

C. 5.4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang / jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Penapatan Diterima di Muka TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
Jumlah	

*Beban yang
Maih Harus
Dibayar
Rp.0*

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

C. 5.5. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**, merupakan kewajiban pemerintah kepada Pihak Ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023
Belanja Pegawai yang Maih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

C. 7. Ekuitas

*Ekuitas
Rp.69,095,88
4*

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp. 69,095,884** dan **Rp. 35,381,250**.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp.0*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0.00%
Pendapatan Pendidikan	0	0	0.00%
Pendapatan Lain - lain	0	0	0.00%
Jumlah	0	0	0.00%

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari penjualan pengelolaan BMN dan Iuran Badan usaha, pendapatan pendidikan dan Pendapatan Lain-lain yang merupakan pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

*Beban
Pegawai Rp.
429,750,000*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 429,750,000** dan **Rp. 586,747,000**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kenaikan beban pegawai disebabkan oleh kenaikan gaji serta tunjangan.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2024	2023	%
Beban Gaji	0	0	0.00
Beban Tunjangan Tunjangan		0	0.00
Beban Tunjangan Profesi Guru		0	0.00
Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	181,750,000	134,747,000	34.88
Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	248,000,000	452,000,000	(45.13)
Beban Tunjangan Khusus		0	0.00
Beban Lembur	0	0	0.00
Jumlah Beban	429,750,000	586,747,000	(26.76)

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp.18,284,00
0*

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 18,284,000** dan **Rp.15,012,000**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	18,248,000	15,012,000	21.56
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	0.00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Beban	18,284,000	15,012,000	21.56

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban
Barang dan
Jasa Rp.
875,738,090*

Jumlah Beban Barang dan Jasa 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 875,738,090** dan **Rp. 781,753,000**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	123,539,090	139,964,000	(11.74)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	86,169,000	107,604,000	(19.92)
Beban Bahan	43,585,000	51,210,000	(14.89)
Beban Honor Output Kegiatan	15,800,000	18,100,000	(12.71)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	33,965,000	36,400,000	(6.69)
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	430,000,000	265,000,000	62.26
Beban Sewa	91,680,000	94,000,000	(2.47)
Beban Jasa Profesi	51,000,000	63,600,000	(19.81)
Beban Jasa Lainnya		5,875,000	(100.00)
Jumlah Beban	875,738,090	781,753,000	12.02

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp.
17,224,230,-*

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 17,224,230** dan **Rp. 21,150,000**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan

TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17,224,230	21,000,000	(17.98)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	150,000	(100.00)
Jumlah Beban	17,224,230	21,150,000	(18.56)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp.
701,152,771,
-*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 701,152,771** dan **Rp. 595,419,740**. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Adapun rincian beban perjalanan adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Perjalanan Biasa	359,942,771	343,484,740	4.68
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,100,000	3,260,000	(66.26)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	127,650,000	137,225,000	(6.98)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	212,460,000	111,450,000	90.63
Jumlah Beban	701,152,771	595,419,740	17.69

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban
Barang untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 605,000,000** dan **Rp. 510,000,000**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan

605,000,000,
-

entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	75,000,000	(100.00)
Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	605,000,000	435,000,000	39.08
Jumlah Beban	605,000,000	510,000,000	18.63

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban
Bantuan
Sosial Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	0	0	0.00
Jumlah Beban	0	0	0.00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan
dan

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 18,194,647** dan **Rp. 19,968,000**. Beban Penyusutan

Amortisasi
Rp.
18,194,647

merupakan beban untuk mencatat lokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2024 dan Tahun 2023*

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	18,194,647	19,968,000	(8.88)
Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Jumlah Penyusutan	18,194,647	19,968,000	(8.88)
Beban Amortisasi Aset Lainnya	0	0	0.00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Amortisasi	0	0	0.00
Jumlah Beban	18,194,647	19,968,000	(8.88)

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tahun 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
- Piutang Lancar	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
- Piutang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah Beban	0	0	0.00

Kegiatan Non Operasional
Rp 0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0** dan **Rp. 0**. Rinciannya adalah sebagai berikut;

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0.00
Jumlah Beban	0	0	0.00

Pos Luar Biasa
Rp.0

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp. 35,381,250

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 35,381,250** dan **Rp. 25,489,250**.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp.(
2,665,343,738)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah deficit sebesar **Rp.(2,665,343,738)** dan **Rp.(2,530,049,740)** Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/deficit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
Rp.0

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp.0**.

E. 4. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian
Nilai Aset Rp.0

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E. 4. 2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas

Rp.0

nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**. Rincian Nilai Persediaan untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Persediaan	Koreksi
1	Barang Konsumsi	-
2	Suku Cadang	-
	Jumlah	-

Selisih

E. 4. 3 Selisih Revaluasi Aset

Revaluasi Aset

Rp.0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**

Koreksi Aset

E. 4. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tetap Non

Revaluasi Rp.0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0**.

Koreksi Lain-

E. 4.5 Koreksi Lain-Lain

Lain Rp.0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0** dan **Rp.0** Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi
Antar Entitas
Rp.
2,699,058,372

E. 5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp. 2,699,058,372** dan **Rp. 2,539,941,740**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas TA 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	2,699,058,372
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	2,699,058,372

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E. 5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar **Rp.0** sedangkan DKEL sebesar **Rp. 2,699,058,372**.

E. 5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 **Rp.0.**Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp.0.**

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar **Rp.0.** dari total **Rp.0.**

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 adalah **Rp.0**

Ekuitas Akhir **E. 6. Ekuitas Akhir**

Rp. 69,095,884

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Adalah sebesar **Rp. 69,095,884** dan **Rp. 35,381,250.**

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Pada awal tahun 2024 operator pelaporan keuangan 664775 dimutasi ke kemenag kabupaten sehingga terjadi sedikit kendala dalam menyelesaikan laporan keuangan, dan untuk menanggulangi hal tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan operator baru.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
UAPPAW : BA(025) ES1(07) SULAWESI BARAT 025073400KD

Tgl Data : 07/05/25 8:18 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 1:13 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,710,268,000	2,699,058,372	(11,209,628)	99.59	2,546,513,000	2,539,941,740	(6,571,260)	99.74
1. Belanja Pegawai	434,000,000	429,750,000	(4,250,000)	99.02	591,750,000	586,747,000	(5,003,000)	99.15
2. Belanja Barang	2,224,268,000	2,217,309,091	(6,958,909)	99.69	1,924,763,000	1,923,194,740	(1,568,260)	99.92
3. Belanja Modal	52,000,000	51,999,281	(719)	100.0	30,000,000	30,000,000	0	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
UAPPAW : BA(025) ES1(07) SULAWESI BARAT 025073400KD

Tgl Data : 07/05/25 8:18 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 1:13 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2,710,268,000	2,699,058,372	(11,209,628)	99.59	2,546,513,000	2,539,941,740	(6,571,260)	99.74
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I : 07 **DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**
WILAYAH/PROVINSI : 025073400KD BA(025) ES1(07) SULAWESI BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 1:14 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	282,000,000	186,000,000	181,750,000	0	181,750,000	97.72	4,250,000
511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	276,000,000	248,000,000	248,000,000	0	248,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	558,000,000	434,000,000	429,750,000	0	429,750,000	98.86	4,250,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	558,000,000	434,000,000	429,750,000	0	429,750,000	98.86	4250000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	125,700,000	121,300,000	120,773,890	0	120,773,890	99.57	526,110
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	113,244,000	86,175,000	86,169,000	0	86,169,000	99.99	6,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	238,944,000	207,475,000	206,942,890	0	206,942,890	99.78	532,110
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	59,140,000	43,585,000	43,585,000	0	43,585,000	100	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	20,700,000	15,800,000	15,800,000	0	15,800,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	37,300,000	33,965,000	33,965,000	0	33,965,000	100	0
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	480,000,000	430,000,000	430,000,000	0	430,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	597,140,000	523,350,000	523,350,000	0	523,350,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,146,000	18,216,000	18,194,000	0	18,194,000	99.88	22,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	20,146,000	18,216,000	18,194,000	0	18,194,000	99.88	22,000
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	108,500,000	91,680,000	91,680,000	0	91,680,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	66,400,000	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	174,900,000	142,680,000	142,680,000	0	142,680,000	100	0
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21,000,000	20,000,000	19,989,430	0	19,989,430	99.95	10,570
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	21,000,000	20,000,000	19,989,430	0	19,989,430	99.95	10,570
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	373,418,000	362,517,000	359,942,771	0	359,942,771	99.29	2,574,229
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,520,000	1,420,000	1,100,000	0	1,100,000	77.46	320,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I : 07 **DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**
WILAYAH/PROVINSI : 025073400KD BA(025) ES1(07) SULAWESI BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 1:14 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	153,450,000	131,150,000	127,650,000	0	127,650,000	97.33	3,500,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	96,540,000	212,460,000	212,460,000	0	212,460,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	625,928,000	707,547,000	701,152,771	0	701,152,771	93.52	6,394,229
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	605,000,000	605,000,000	605,000,000	0	605,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	605,000,000	605,000,000	605,000,000	0	605,000,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,283,058,000	2,224,268,000	2,217,309,091	0	2,217,309,091	98.23	6958909
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82,000,000	52,000,000	51,999,281	0	51,999,281	100	719
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	82,000,000	52,000,000	51,999,281	0	51,999,281	100	719
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	82,000,000	52,000,000	51,999,281	0	51,999,281	100	719
	JUMLAH BELANJA	2,923,058,000	2,710,268,000	2,699,058,372	0	2,699,058,372	99.59	11,209,628

NERACA
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
UAPPAW : (025073400KD) BA(025) ES1(07) SULAWESI BARAT

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 1:13 PM
Halaman : 1
lap_neraca_uappaw_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	150,000	240,000	(90,000)	(37.50)
JUMLAH ASET LANCAR	150,000	240,000	(90,000)	(37.50)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	327,391,100	275,391,819	51,999,281	18.88
AKUMULASI PENYUSUTAN	(258,445,216)	(240,250,569)	(18,194,647)	7.57
JUMLAH ASET TETAP	68,945,884	35,141,250	33,804,634	96.20
JUMLAH ASET	69,095,884	35,381,250	33,714,634	95.29

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	69,095,884	35,381,250	33,714,634	95.29
JUMLAH EKUITAS	69,095,884	35,381,250	33,714,634	95.29
JUMLAH EKUITAS	69,095,884	35,381,250	33,714,634	95.29
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	69,095,884	35,381,250	33,714,634	95.29

Keterangan :
FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
WILAYAH/PROVINSI : (025073400KD) BA(025) ES1(07) SULAWESI BARAT

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 1:13 PM
Halaman : 1
lap_lpe_uappaw_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	35,381,250	25,489,250	9,892,000	38.81
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,665,343,738)	(2,530,049,740)	(135,293,998)	5.35
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,699,058,372	2,539,941,740	159,116,632	6.26
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	33,714,634	9,892,000	23,822,634	240.83
EKUITAS AKHIR	69,095,884	35,381,250	33,714,634	95.29

Keterangan :
FINAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : (07) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
WILAYAH/PROVINSI : (025073400KD) BA(025) ES1(07) SULAWESI BARAT

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 1:13 PM

Halaman : 1

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	0	0	0	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	429,750,000	586,747,000	(156,997,000)	-
Beban Persediaan	18,284,000	15,012,000	3,272,000	-
Beban Barang dan Jasa	875,738,090	781,753,000	93,985,090	-
Beban Pemeliharaan	17,224,230	21,150,000	(3,925,770)	-
Beban Perjalanan Dinas	701,152,771	595,419,740	105,733,031	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	605,000,000	510,000,000	95,000,000	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : (07) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
WILAYAH/PROVINSI : (025073400KD) BA(025) ES1(07) SULAWESI BARAT

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 1:13 PM

Halaman : 2

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	18,194,647	19,968,000	(1,773,353)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	2,665,343,738	2,530,049,740	135,293,998	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,665,343,738)	(2,530,049,740)	(135,293,998)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	-
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	-
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,665,343,738)	(2,530,049,740)	(135,293,998)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,665,343,738)	(2,530,049,740)	(135,293,998)	-

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : BA(025) ES1(07) SULAWESI BARAT

Tgl. Cetak 07/05/2025
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	240,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	275,391,819	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	240,250,569
0.0	391111	Ekuitas	0	35,381,250
JUMLAH			275,631,819	275,631,819

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
WILAYAH/PROVINSI : (025073400KD) BA(025) ES1(07) SULAWESI BARAT

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 1:14 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	150,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	327,391,100	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	258,445,216
0.0	313111	Ditagikan ke Entitas Lain	0	2,699,058,372
0.0	391111	Ekuitas	0	35,381,250
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	181,750,000	0
3.0	511522	Beban Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	248,000,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	123,539,090	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	86,169,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	43,585,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	15,800,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	33,965,000	0
3.0	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	430,000,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	91,680,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	51,000,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17,224,230	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	359,942,771	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,100,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	127,650,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	212,460,000	0
3.0	526123	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	605,000,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	18,194,647	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	18,284,000	0
JUMLAH			2,992,884,838	2,992,884,838

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
WILAYAH/PROVINSI : (025073400KD) BA(025) ES1(07) SULAWESI BARAT

Tgl Data : 07/05/25 7:37 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 1:14 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,699,058,372
3.0	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	181,750,000	0
3.0	511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	248,000,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	120,773,890	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	86,169,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	43,585,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	15,800,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	33,965,000	0
3.0	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	430,000,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18,194,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	91,680,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	51,000,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19,989,430	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	359,942,771	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,100,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	127,650,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	212,460,000	0
3.0	526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	605,000,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51,999,281	0
JUMLAH			2,699,058,372	2,699,058,372

Keterangan :
FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 0 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : null

WILAYAH/PROVINSI : null

null

Kode Lap : LRA.P.W.1
Tanggal : 09/05/25 10:02 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pend_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
null	null					
null	null					
	null	null	null	null	null	0
	null	null	null	null	null	0
	JUMLAH PENDAPATAN	null	null	null	null	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I : 07 **DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**
WILAYAH/PROVINSI : 025073400KD **BA(025) ES1(07) SULAWESI BARAT**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 1:14 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	282,000,000	186,000,000	181,750,000	0	181,750,000	97.72	4,250,000
511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	276,000,000	248,000,000	248,000,000	0	248,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	558,000,000	434,000,000	429,750,000	0	429,750,000	98.86	4,250,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	558,000,000	434,000,000	429,750,000	0	429,750,000	98.86	4250000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	125,700,000	121,300,000	120,773,890	0	120,773,890	99.57	526,110
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	113,244,000	86,175,000	86,169,000	0	86,169,000	99.99	6,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	238,944,000	207,475,000	206,942,890	0	206,942,890	99.78	532,110
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	59,140,000	43,585,000	43,585,000	0	43,585,000	100	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	20,700,000	15,800,000	15,800,000	0	15,800,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	37,300,000	33,965,000	33,965,000	0	33,965,000	100	0
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	480,000,000	430,000,000	430,000,000	0	430,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	597,140,000	523,350,000	523,350,000	0	523,350,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,146,000	18,216,000	18,194,000	0	18,194,000	99.88	22,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	20,146,000	18,216,000	18,194,000	0	18,194,000	99.88	22,000
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	108,500,000	91,680,000	91,680,000	0	91,680,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	66,400,000	51,000,000	51,000,000	0	51,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	174,900,000	142,680,000	142,680,000	0	142,680,000	100	0
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21,000,000	20,000,000	19,989,430	0	19,989,430	99.95	10,570
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	21,000,000	20,000,000	19,989,430	0	19,989,430	99.95	10,570
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	373,418,000	362,517,000	359,942,771	0	359,942,771	99.29	2,574,229
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,520,000	1,420,000	1,100,000	0	1,100,000	77.46	320,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I : 07 **DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU**
WILAYAH/PROVINSI : 025073400KD BA(025) ES1(07) SULAWESI BARAT

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/25 1:14 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	153,450,000	131,150,000	127,650,000	0	127,650,000	97.33	3,500,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	96,540,000	212,460,000	212,460,000	0	212,460,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	625,928,000	707,547,000	701,152,771	0	701,152,771	93.52	6,394,229
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	605,000,000	605,000,000	605,000,000	0	605,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	605,000,000	605,000,000	605,000,000	0	605,000,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,283,058,000	2,224,268,000	2,217,309,091	0	2,217,309,091	98.23	6958909
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82,000,000	52,000,000	51,999,281	0	51,999,281	100	719
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	82,000,000	52,000,000	51,999,281	0	51,999,281	100	719
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	82,000,000	52,000,000	51,999,281	0	51,999,281	100	719
	JUMLAH BELANJA	2,923,058,000	2,710,268,000	2,699,058,372	0	2,699,058,372	99.59	11,209,628